

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan peneliti bahan komparatif dan referensi, penelitian sebelumnya Selain itu, jika ada kesamaan dengan penelitian ini, untuk menghindari membuat kesimpulan. Akibatnya, temuan studi pendukung berikut disertakan dalam tinjauan pustaka ini oleh penulis :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	(Shao & Wang., 2018)	<i>A Review on Agency Cost in China</i>	Sistem perusahaan modern, salah satu masalah dasar tata kelola perusahaan adalah untuk mengurangi biaya keagenan, tetapi di bawah pengaruh struktur tata kelola internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Karena masalah biaya agensi dalam tata kelola perusahaan telah menjadi pusat penelitian, makalah ini menyajikan profil pencapaian penelitian yang relevan dari biaya agensi dari 2012 hingga 2017 di Cina, dan merangkum faktor pengaruh dan konsekuensi ekonomi yang berkaitan dengan biaya agensi dalam bentuk dari tinjauan literatur.

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| 2 | (Hatang & Hapsari., 2020) | Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris dan <i>Agency Cost</i> | Temuan menunjukkan bahwa dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial semuanya berdampak pada biaya agensi. Biaya agensi berpengaruh dan memiliki hubungan yang menguntungkan dengan sebagian kepemilikan manajemen. |
| 3 | (Yuliandini et al., 2020) | Pengaruh Kebijakan Dividen, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan kepemilikan Manajerial Terhadap Biaya Keagenan pada Emiten Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018 | According to the study's findings, institutional ownership and dividend policy have no impact on agency costs, whereas leverage and managerial ownership have a beneficial impact. |
| 4 | (Agarwal & Singh., 2020) | <i>Board Structure and Agency Cost</i> | Temuan hasil juga menyimpulkan bahwa ada dampak positif dari ukuran dewan kecil, ukuran perusahaan, pertumbuhan, direktur independen dan rapat dewan yang sering pada pengembalian aset dan membantu mengurangi biaya agensi tetapi direktur non-independen tidak membuat dampak apa pun dan direktur wanita berdampak negatif pada biaya keagenan. |

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 5 | (Nguyen et al., 2020) | <i>Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam</i> | Hasilnya dapat menciptakan mekanisme Good Corporate Governance yang efektif dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajerial untuk menurunkan konflik keagenan, dan karenanya menurunkan Agency Cost. kuadrat (OLS), FEM dan REM dianggap menggunakan untuk mengatasi masalah ekonometrik dan untuk meningkatkan akurasi koefisien regresi. |
| 6 | (Agarwal & Singh., 2020) | <i>Board Structure and Agency Cost</i> | Temuan hasil juga menyimpulkan bahwa ada dampak positif dari ukuran dewan kecil, ukuran perusahaan, pertumbuhan, direktur independen dan rapat dewan yang sering pada pengembalian aset dan membantu mengurangi biaya agensi tetapi direktur non-independen tidak membuat dampak apa pun dan direktur wanita berdampak negatif pada biaya keagenan. |
| 7 | (Hasan., 2021) | <i>Corporate Social Responsibility and Agency Cost : Evidence from the UK retail Industry</i> | Penelitian ini menawarkan beberapa implikasi yang terkait dengan investasi CSR dan mekanisme tata kelola perusahaan kepada pemegang saham dan manajemen pengecer yang terdaftar di Inggris dan akademis. Studi ini tidak menemukan efek moderasi ukuran perusahaan untuk CSR - Agency Cost yang terdaftar di Inggris. |

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| 8 | (Al-Kahfi et al., 2021) | Pengaruh Penerapan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Agency Cost</i> | Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya agensi, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi, dan umur perusahaan, variabel kontrol, berpengaruh signifikan terhadap biaya agensi. biaya agensi. Variabel kontrol hanya berkonsentrasi pada satu variabel utama yaitu usia perusahaan, sedangkan proksi untuk menilai efektivitas sistem tata kelola perusahaan yang baru berkonsentrasi pada keduanya. |
| 9 | (Nugraha et al., 2021) | <i>The Influence of Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Board of Commissioners on Agency Costs</i> | Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mengurangi biaya agensi. Namun, variabel dewan komisaris dan kepemilikan manajerial memiliki dampak yang merugikan terhadap biaya keagenan. |

10 (Setia et al., 2022)	<i>Agency Problem Analysis From Committee And Ownership Structures</i>	Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesulitan keagenan, komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan. Karena fakta bahwa masalah keagenan dapat diselesaikan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan. Struktur kepemilikan dapat memetakan pemisahan antara kekuasaan dan kontrol atas organisasi, sedangkan struktur komite sangat bermanfaat dalam mengendalikan konflik antara manajemen dan pemegang saham.
-------------------------	--	---

Sumber: olah data 2022

B. Agency Theory

Menurut Rivandi (2021) hubungan organisasi sebagai eksekutif mempengaruhi individu untuk melakukan administrasi untuk kepentingan mereka termasuk menunjuk ahli dalam menarik strategi untuk *agent*. Hubungan organisasi menyebabkan masalah organisasi sehingga para ahli akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan *principal*, yang merupakan misi utama organisasi untuk mendorong bantuan pemerintah dan ketenangan pemilik modal.

Pertemuan-pertemuan yang menentukan pameran organisasi di dalam korporasi berlangsung untuk memberikan peluang terbaik bagi organisasi untuk sukses di masa depan. Prinsip (investor) dan agen (manajer), dengan siapa mereka memiliki hubungan kontraktual, berkumpul. Dengan mendelegasikan kekuatan dinamis kepada spesialis, prinsipal (investor) berkolaborasi dengan agen (manajer) untuk memberikan berbagai bentuk bantuan kepada perusahaan. Hal ini akan menyebabkan para ahli bertindak lebih sering untuk kepentingan mereka sendiri, oleh karena itu untuk mencegah hal ini, mereka harus secara mendasar menangani perilaku administratif dengan mengawasinya dan membayar biaya bagi auditor untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Biaya keagenan adalah biaya yang dikeluarkan oleh kepala untuk membayar pemeriksa. (Murdiansyah et al., 2020).

Menurut Hatang & Hapsari (2020) *agency cost* adalah hubungan yang mengikat secara hukum antara agen dan principal dalam menjalankan organisasi. Hipotesis ini muncul mengingat kekhasan pembagian kepentingan. Principal adalah investor yang memilih seorang spesialis atau eksekutif yang cakap di bidangnya untuk mempertahankan bisnis dengan tujuan investor mendapatkan keuntungan terbesar dari penawaran modal yang mereka sumbangkan. agen sebagai pimpinan organisasi memiliki kemampuan beradaptasi untuk melengkapi organisasi para eksekutif dengan tujuan bahwa semakin menonjol manfaat organisasi, semakin menonjol pula manfaat yang didapat. Principal bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi administrasi dalam menjalankan organisasi dan menjamin bahwa administrasi

bertindak berdasarkan kepentingan yang sah untuk organisasi, bukan kepentingan pribadi.

Menurut teori keagenan, konflik antara agen (manajemen) dan prinsip (pemilik) yang terjadi ketika salah satu pihak berusaha untuk mencapai atau mengikuti tingkat perkembangan yang diperlukan berdampak pada kinerja organisasi. Inkonsistensi data ada untuk manajer, bahkan untuk audiens eksternal seperti kreditur dan investor. Ketika manajer memiliki lebih banyak akses ke dan lebih akrab dengan data internal organisasi daripada orang luar, ada ketidakseimbangan data. Administrator sekarang memiliki kesempatan untuk menggunakan informasi yang mereka miliki untuk mengelola rincian keuangan dan memajukan pertumbuhan mereka sendiri. Dalam organisasi, ada dua kepentingan yang berbeda, dan masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat keberhasilan yang optimal (Yuliandini et al., 2020).

Menurut Agarwal & Singh (2020) pendekatan pertama berkaitan dengan pendekatan Teori Keagenan, yang menggambarkan dewan raksasa masuk akal dibandingkan dengan ukuran dewan kecil karena mudah untuk memantau kegiatan manajemen karena lebih banyak anggota akan dapat meninjau tindakan manajemen. Pendekatan kedua berfokus pada Teori Ketergantungan Sumber Daya, yang menunjukkan papan raksasa yang membawa lebih banyak peluang untuk lebih banyak koneksi ke organisasi lain dan, dengan demikian, akses ke sumber daya eksternal seperti legitimasi, saran, dan nasihat. Meskipun

demikian, ada batasan berat tertentu untuk memiliki dewan yang lebih besar di perusahaan perusahaan. Papan yang lebih besar kurang layak dan praktis.

Dalam dunia bisnis, ada banyak koneksi antara agen dan prinsipal. Baik agen dan prinsipal memiliki pilihan untuk melindungi perjanjian dengan mitra lain, itulah sebabnya mencoba memberikan paket pembayaran yang menarik untuk setiap bisnis yang dilakukan agen, karena agen memiliki informasi khusus tentang organisasi yang dijalankan. *Self Organization Hypothesis, Signifikansi Investor* dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan sebuah organisasi untuk agen yang memiliki pemahaman yang unggul dalam mempertahankan bisnis (Prastiwi & Dewi, 2019).

C. *Agency Cost*

Ada pertemuan terkait yang diadakan di dalam perusahaan untuk memutuskan seberapa baik kinerjanya, memberikan peluang kuat untuk memiliki kemungkinan masa depan yang menjanjikan. Prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer) yang terkait satu sama lain secara hukum berkumpul. Untuk memberikan tingkat bantuan tertentu kepada bisnis, prinsipal (pemegang saham) mendelegasikan pekerjaan kepada agen (manajer), memberi agen kekuatan dinamis. Akibatnya, agen lebih cenderung bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Untuk menghentikan ini, agen harus, paling tidak, terlibat dalam perilaku administratif dengan mengawasi manajer dan mengeluarkan uang untuk membayar evaluator untuk memverifikasi ringkasan keuangan perusahaan. Biaya agensi adalah biaya

yang dikeluarkan prinsipal untuk membayar auditor (Murdiansyah et al., 2020).

Biaya keagenan adalah biaya internal yang dihasilkan dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam suatu organisasi; tersembunyi dalam setiap keputusan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Agen mengacu pada manajer perusahaan, yang bekerja atas nama pemegang saham. Karena pemegang saham tidak dapat secara teratur mengontrol setiap aktivitas manajer di perusahaan, itu menghasilkan informasi asimetris, yang dapat menyebabkan risiko etika dan kurangnya consensus (Nguyen et al., 2020).

Menurut Agarwal & Singh (2020), *Agency cost* ketidaksejajaran kepentingan antara prinsipal dan agen akan menyebabkan peningkatan biaya keagenan. Ketimpangan kepentingan ini muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dari manajemen. Kepentingan pribadi adalah tujuan utama dari prinsipal dan agen perusahaan perusahaan. Prinsipal menyewa agen untuk menjalankan fungsi perusahaan perusahaan secara efektif dan efisien. Ketika prinsipal memberi agen mereka beberapa otoritas pengambilan keputusan, agen sering menyalahgunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan mereka sendiri dengan membuat penilaian dan mengambil tindakan yang mungkin atau mungkin tidak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Di dunia sekarang ini, hubungan keagenan cukup lazim baik di bidang perusahaan maupun ekonomi.

Di dalam hubungan kontraktual, masing-masing pihak didorong oleh manfaat ekonomi menurut model *man for agency* teori, sehingga manajer atau agen cenderung berperilaku oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan mereka, yang mengarah ke dilema agensi – konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Hasan, 2021).

Biaya pengawasan klien mengacu pada insentif dan biaya pemantauan prinsipal untuk membuat agen melakukan segala kemungkinan untuk mengejar keuntungan maksimal dari prinsipal; Biaya penjaminan agen adalah biaya yang dijamin oleh agen agar tidak merugikan kepentingan prinsipal, dan sebaliknya biaya ganti rugi. Sedangkan kerugian residual berarti hilangnya nilai yang timbul dari keputusan prinsipal atas nama agen. Dengan asumsi bahwa agen dan klien berbagi informasi dan bakat yang sama, kerugian residual sama dengan perbedaan antara pengambilan keputusan kedua belah pihak (Shao & Wang, 2018).

Menurut Dewi & Ardiana (2014) memberikan kekuatan motivasi yang tepat kepada supervisor dan dengan membawa biaya pengawasan untuk menjaga risiko dari direksi dapat diambil oleh investor (principal) dalam membatasi keunikan kecenderungan mereka. Biaya ini disebut biaya kantor. Memperluas kepemilikan saham oleh dewan adalah salah satu metode untuk mengurangi *agency cost*. Masalah keagenan akan berkurang jika manajemen juga merupakan investor (manajer pemilik), karena ini akan mengurangi komitmen manajer pemilik untuk mengendalikan laba, karena manajemen akan sedikit banyak terpengaruh oleh laba atau rugi (agen). dan investor (prinsipal).

Agency cost, yang menggambarkan dewan raksasa masuk akal dibandingkan dengan ukuran dewan kecil karena mudah untuk memantau kegiatan manajemen karena lebih banyak anggota akan dapat meninjau tindakan manajemen (Agarwal & Singh, 2020).

D. Dewan Komisaris Independen

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Diharapkan dengan adanya keberadaan komisaris independen dalam struktur perusahaan, dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan yang dapat muncul. Sehingga pengelolaan perusahaan bisa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya tentu berkaitan dengan pengelolaan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan mitra usaha eksekutif, orang perseorangan yang terpisah dari kelompok hakim yang berpengaruh dan investor pengendali, dan yang dikecualikan dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mengganggu kemampuannya untuk bertindak semata-mata berdasarkan keprihatinan yang sah bagi organisasi. Tugas memeriksa sifat data yang ada dalam rekening keuangan biasanya didelegasikan kepada komite pemimpin yang tidak memihak.

Kemampuan beberapa komisaris untuk beroperasi secara tidak memihak dan menahan diri dari berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai untuk perusahaan dapat dikompromikan oleh hubungan keluarga mereka dengan manajemen puncak atau investor. Karena dewan komisaris ini dapat mengendalikan bisnis, menurunkan biaya keagenan, kehadirannya di perusahaan dapat mengurangi masalah dan menghindari oportunisme (Nugraha et al., 2021).

Dewan komisaris berfungsi sebagai penasihat dan pengawas untuk pengelolaan bisnis. Rapat yang dikenal sebagai dewan komisaris independen dapat menghasilkan anggota dewan direksi perusahaan karena mereka sering kekurangan perspektif tentang hubungan keuangan, penatagunaan, dan kepemilikan saham (Al-Kahfi et al., 2021).

Menurut Widianingsih (2018) anggota dewan komisaris independen adalah mereka yang tidak memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan pemegang saham atau CEO. Ini harus dilihat dari perspektif teori keagenan karena kepentingan supervisor dan investor dapat dicampur dengan kehadiran sekelompok pemimpin terkemuka saat mereka membahas instrumen yang benar-benar ke dalam untuk menyaring perilaku untuk mengambil keuntungan dari pintu atau keuntungan yang terbuka sesaat. dan mengabaikan keuntungan eksekutif yang ditarik.

Menurut Setia et al (2022) dewan komisaris memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menyaring kegiatan staf manajerial puncak. Selanjutnya, anggota dewan komisaris seharusnya bertindak secara fundamental dan

otonom. Kemampuan yang ideal bagi individu dari pimpinan badan tertinggi adalah memiliki kepercayaan dan komitmen dengan tujuan agar mereka dapat memahami dan sering berpikir tentang perusahaan. Alasan ini mendorong persyaratan untuk pengaturan komisaris independen dengan bantuan komite audit sebagai pengawas dari proses pelaporan keuangan.

Komisaris Independen adalah orang yang tidak terafiliasi dengan organisasi, bukan mitra dalam hal apapun, tidak memegang saham perusahaan, dan tidak memiliki kontak lain dengan eksekutif atau manajer perusahaan. Menurut aturan BEI, hakim bebas membuat sekitar 30% dari keanggotaan komisaris independen. Kepentingan pemodal kecil dalam suatu korporasi harus dilindungi dengan adanya komisaris independen (Maulana, 2020).

Menurut Widyastari & Sari (2018) Anggota dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dengan organisasi baik secara profesional maupun pribadi. Pemeriksaan yang lebih luas terhadap sifat eksposur akan didorong, dan upaya/latihan untuk tidak melaporkan data perusahaan akan dibatasi, oleh tingkat komisaris independen yang semakin menonjol. Selain itu, komisaris independen independen diharapkan dapat mendekati perusahaan untuk meminta pengungkapan CSR dan dapat menjamin keseimbangan antara keputusan dan tindakan yang diambil oleh entitas dengan karakteristik organisasi yang sadar sosial dan otentik.

Komisaris independen sebagai pembela kepentingan investor minoritas dan mitra yang berbeda dan mengikuti pedoman kesopanan. Kehadiran dewan komisaris independen diharapkan dapat membantu perusahaan dalam

membagi aset dalam menemukan penilaian yang baik tentang teknik manajemen pajak dan memberikan pengalaman dan informasi berharga dalam perencanaan pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

Komisaris independen adalah orang yang tidak terkait dengan investor organisasi, ketua, atau dewan juri terkemuka, dan yang tidak menduduki posisi manajerial senior di sana. Komisaris independen sangat penting bagi organisasi, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengawas yang memberikan instruksi kepada perusahaan tentang cara beroperasi sesuai dengan hukum. Untuk menghindari pengabaian hukum yang berlaku, komisaris independen menengahi keputusan atau strategi antara manajemen dan pemilik usaha. Hal ini terutama berlaku untuk masalah yang berhubungan dengan pajak. Dewan komisaris memilih seorang ketua yang bebas mengelola hubungan di dalam perusahaan dan dapat melakukan hubungan antara pejabat dalam negeri dan investor dalam keadaan darurat. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan wakil pengurus perusahaan dan berasal dari luar pengurus. Mereka dipercaya untuk menengahi antara dua sesi karena mereka objektif dan tidak mungkin memiliki konflik internal (Muliasari & Hidayat, 2020).

E. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Saleh & Sihite, (2020) menyatakan bahwa dengan konsep maupun praktik untuk segala maksud dan tujuan, *corporate social responsibility* tidak dapat dipisahkan dari tindakan penguatan wilayah lokal

atau sering disebut sebagai peningkatan wilayah lokal. Seringkali kegiatan *corporate social responsibility*, khususnya di bidang sosial dan keuangan, ditujukan untuk penguatan daerah. Kemudian lagi, latihan penguatan area lokal sering memasukkan atau mengharapkan program *corporate social responsibility*. Selanjutnya, selalu disepakati bahwa salah satu tujuan akhir dari pelaksanaan *corporate social responsibility* adalah wilayah lokal yang terlibat. Hanya saja dalam pelaksanaannya, diharapkan sepenuhnya penguatan daerah melalui proyek-proyek *corporate social responsibility* terdorong karena masalah korespondensi antara ketua gerakan dengan daerah yang menjadi tujuan program aksi. Isu-isu korespondensi ini berubah, dari substansi atau pesan korespondensi yang berhubungan dengan program, pengangkut korespondensi, menjadi media korespondensi.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah hubungan antara organisasi dan masyarakat pada umumnya. Tujuan utama CSR, yang melampaui apa yang diizinkan oleh undang-undang, adalah untuk menguntungkan investor. Program CSR merupakan inisiatif perusahaan untuk keberlanjutan (pertumbuhan dan perkembangan) perusahaan, yang pada saat ini berfungsi sebagai pusat laba daripada pusat biaya (profit center). Di Indonesia saat ini, inisiatif CSR menjadi hal yang biasa karena membantu organisasi memperkuat posisi mereka dengan berfokus pada hal-hal seperti persepsi investor tentang mereka dan lini bisnis mereka. Menurut berbagai bisnis, tujuan awal dari berbagai program CSR (Rivandi & Annisa, 2020).

Menurut Nayenggita et al (2019) *corporate social responsibility* (CSR) adalah kewajiban bisnis untuk berperilaku secara moral, bekerja secara legal, dan meningkatkan kesenangan pribadi perwakilan serta iklim, lingkungan, dan jaringan komunitas lokal. Sebuah gerakan yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah gerakan yang dimulai oleh para pengusaha atau mitra yang menunjukkan perilaku tanggung jawab sosial di masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah struktur yang memungkinkan perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan masalah lingkungan dan sosial ke dalam tanggung jawab dan kerjasamanya dengan pemangku kepentingan, melampaui kewajiban hukum organisasi. Atas dasar bahwa perusahaan telah mengeksploitasi masyarakat dan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan lebih luas sebagai korespondensi antara masyarakat dan daerah sekitarnya (Yuliandini et al., 2020).

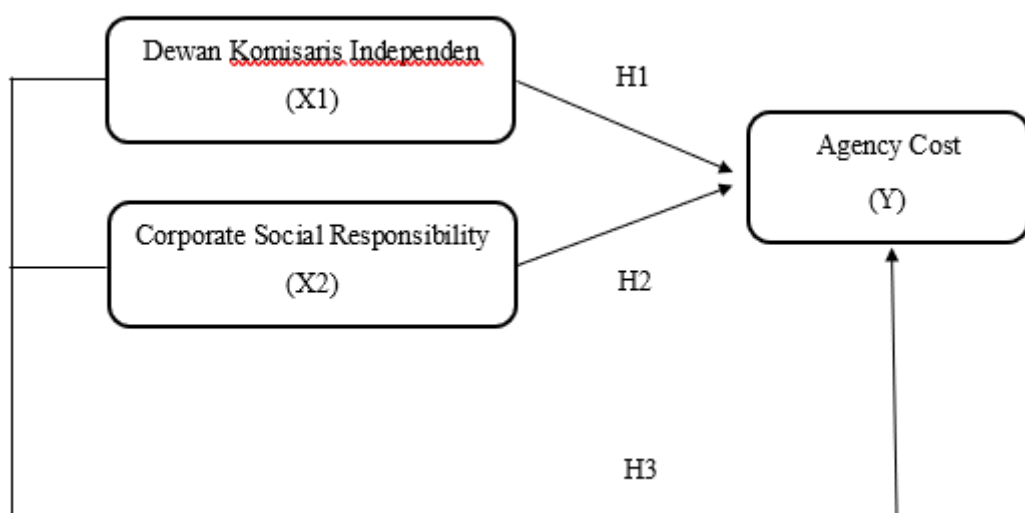
Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) bukanlah tindakan komersial yang diwajibkan oleh aturan dan pedoman, seperti komitmen biaya atau persiapan perusahaan untuk pekerjaan, melainkan kewajiban organisasi untuk berpartisipasi dalam bantuan pemerintah daerah. Persyaratan yang tak terhindarkan bagi bisnis untuk memiliki pilihan berkomunikasi dan berinteraksi secara lokal dengan publik dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Mengingat diperlukannya budaya dengan visi moral yang luas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,

maka budaya perusahaan dan moral yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan tentunya saling berkaitan erat (Rohyati & Satripto, 2021).

Corporate social responsibility telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

F. Kerangka Pikir

Kerangka kerja penelitian ini adalah sebagai berikut, dan didasarkan pada landasan teori dan studi pendukung:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

G. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Agency Cost*

Menurut Pratiwi & Yulianto (2016) Komisaris independen memiliki dampak yang besar terhadap biaya keagenan. Karena komisaris independen memiliki nilai positif, dampaknya terhadap biaya keagenan menguntungkan. Dewan komisaris terkemuka adalah unit perusahaan yang sepenuhnya bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi, memberi nasihat, dan memastikan bahwa badan pengawas menjunjung tinggi GCG. Komisaris independen harus bertindak bebas ketika mengarahkan tindakan administratif karena mereka tidak memiliki afiliasi dengan organisasi.

Menurut Simanjuntak & Sinaga, (2021) Dewan komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap biaya keagenan dengan nilai 0,000, sesuai dengan hasil pada tabel di atas. Komposisi dewan komisaris perusahaan diperkirakan akan mempengaruhi biaya keagenan, yang menyiratkan bahwa di mana tingkat kualitas audit yang tinggi diperlukan oleh dewan komisaris akuntan publik, biaya audit juga akan naik sebagai fungsi dari komposisi dewan komisaris. dewan komisaris perusahaan.

H₁: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Agency Cost*.

H. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Agency Cost*

Menurut Hasan (2021) melakukan penelitian penelitian terkait pengaruh *corporate social Responsibility* dan *agency cost* menemukan hasil penemuan

ini adalah kontribusi yang signifikan dari studi ke literatur Inggris karena hasilnya menunjukkan bahwa dampak CSR pada *agency cost* di Inggris terdaftar secara konsisten. Untuk produsen terdaftar di Inggris dengan CSR dikendalikan, aset mereka omset dipengaruhi secara negatif oleh ukuran dewan, modal struktur, dan ukuran perusahaan, sedangkan penjualan dan umumnya rasio biaya administrasi hanya dipengaruhi secara negatif. Oleh karena itu, utang luar negeri diusulkan untuk mengurangi konflik keagenan. Perusahaan besar perlu meningkatkan tata kelola perusahaan mereka mekanisme dan sistem pengendalian internal untuk mengurangi keagenan konflik.

H₂: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Agency Cost*.

I. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Agency Cost*.

H₂: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Agency Cost*.

H₃: Terdapat pengaruh signifikan antara Dewan Komisaris Independen dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap *Agency Cost*.